

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGRAN 2017 - 2019**

Diajukan Oleh
HAERUDIN OHOIRENAN
4516012139



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2017 - 2019

Nama Mahasiswa : Haerudin Ohoirenan

Stambuk/Nim : 4516012139

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Tempat penelitian : Langgur Maluku Tenggara

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Hemianawaty, SE.,MM

Indravani Nur, S.pd.,SE.,M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bososwa Makassar

Dekan Fakultas Ekonom
Universitas Bosowa

Ketua Prodi Studi
Manajemen

Dr. H. A. Arifuddin Mane.,SE.,M.Si.,MH

Indravani Nur, S.pd.,SE.,M.Si

Tanggal Pegesahan.....

Kata Pengantar

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya, dan tak lupa pula shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Muahammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ejonomi Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “*Analisis Kinerja Keuangan Padan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2017-2019*”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Pertama - tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr.H.A Arifuddin Mane, SE., M.Si.,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. HJ. Herminaway Abu Bakar SE.,MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Ibu Indrayani Nur, S.Pd SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Bososwa.

5. Kepada Ibu Dr. HJ. Herminaway Abu Bakar SE.,MM dan Ibu Indrayani Nur, S.Pd SE., M.Si sebagai Dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan bantuan literatur, serta diskusi – diskusi yang dilakukan dengan penulis
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Kepada pegawai kantor KESBANPOL Maluku Tenggara. Terima kasih telah memberikan izin dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pebeliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. semoga kebaikan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala disisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Makassar

Penulis

***analysis of the financial performance of the Southeast Maluku district government
for the 2017-2019 fiscal year***

by :

Haerudin Ohoirenan

Prodi Management Faculty of Economics

University Bosowa

ABSTRACT

Haerudin Ohoirenan 2020. thesis. financial performance analysis in the Southeast Maluku district government for the 2017-2019 fiscal year, Maluku province was supervised by Dr. HJ. Herminaway Abu Bakar SE., MM and Mrs. Indrayani Nur, S.Pd SE., M.Si.

The research objective is to find out and analyze the financial performance of the Southeast Maluku district government.

The object of this research is the local government office of Southeast Maluku Regency.

The results of this study indicate that to optimize financial performance in the local government of Maluku Tenggara district

Keywords: Financial Performance, Income Budget, Expenditure Budget, APBD

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
Anggaran 2017-2019

Oleh :

Haerudin Ohoirenan

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Haerudin Ohoirenan 2020. skripsi.analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara tahun anggaran 2017-2019, provinsi maluku dibimbing oleh Ibu Dr. HJ. Herminaway Abu Bakar SE.,MM dan Ibu Indrayani Nur, S.Pd SE., M.Si

tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara.

objek penelitian ini adalah kantor pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara.

hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten maluku tenggaradi

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, APBD

PERYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haerudin Ohoirenan
Nim : 4516012139
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun Anggaran 2017-2019

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam skripsi ini tidak pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat larya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 22 Oktober 2020

Mahasiswa yang bersangkutan


METERAI
TEMPEL
6000
RUPIAH
Haerudin Ohoirenan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	iv
PERBYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI.....	v
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	3
1.4 MANFAAT PENELITIAN	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 MANAJEMEN KEUANGAN.....	5
2.1.1 PENGERTIAN MANAJEMEN KEUANGAN.....	5
2.1.2 FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN	6
2.1.3 TUJUAN MANAJEMEN KEUANGAN	7

2.1.4 MANFAAT MANAJEMEN KEUANGAN	9
2.2 KINERJA KEUANGAN	11
2.2.1 PENGERTIAN KINERJA KEUANGAN	11
2.2.2 ANALISIS KINERJA KEUANGAN.....	12
2.2.3 MANFAAT KINERJA KEUANGAN	14
2.2.4 KEUANGAN DAERAH	14
2.2.5 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	15
2.2.6 KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	16
2.2.7 PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	18
2.2.8 TUJUAN PENGUKUR KINERJA KEUANGAN DAERAH	19
2.2.9 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAERAH	19
2.2.1.1 TUJUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	20
2.3 ANALISIS RASIO KEUANGAN.....	21
2.3.1 RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH.....	21
2.3.2 RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	23
2.3.2 RASIO EFISIENSI KEUANGAN DAERAH.....	23
2.4 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	25

2.2 KERANGKA PIKIR.....	28
2.3 HIPOTESIS.....	29
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN.....	30
3.2 METODE PENGUMPULAN DATA.....	30
3.3 JENIS DAN SUMBER DATA.....	31
3.3.1 JENIS DATA.....	31
3.3.1 SUMBER DATA.....	31
3.4 METODE ANALISIS DATA.....	31
3.5 DEFINISI OPERASIONAL	32
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 GAMBARAN UMU DAERAH	34
4.1.1 KONDISI GEOGRAFIS.....	34
4.1.2 BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA	34
4.1.3 VISI DAN MISI BPKD KABUPATEN MALUKU TENGGARA ...	37

4.1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPKD KABUPATEN MALUKU TENGGERA.....	38
4.1.5 STRUKTUR ORGANISASI	38
4.1.6 URAIAN TUGAS.....	40
4.2 DATA KHUSUS	45
4.2.1 APBD KABUPATEN MALUKU TENGGERA	45
4.3 DESKRITIF DATA.....	47
4.4 HASIL PENELITIAN	47
4.4.1 RASIO KEMANDIRIAN DAERAH	47
4.4.2 RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	51
4.4.3 RASIO EFISIENSI KEUANGAN DAERAH.....	54
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 KESIMPULAN.....	51
5.2 SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan ialah salah-satu kajian yang dilakukan guna memprediksi sejauh mana suatu perusahaan / organisasi telah mengerjakan serta mengaplikasikan tata cara penerapan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan menggambarkan satu kondisi keuangan perusahaan yang dianalisa menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga bisa dilihat dari baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang mereprestasikan hasil kerja pada periode tertentu. Hal ini sungguh serius agar sumber daya digunakan secara ideal dalam menyambut perbaikan wilayah.

instansi pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan serta mengontrol keperluan bangsa dan negara. instansi pemerintahan umumnya untuk mengurus kegiatan kepada masyarakat luas. Selaku organisasi nirlaba, instansi pemerintah memiliki keinginan untuk memberi fasilitas dan keterampilan .

sasaran yang perlu dicapai umumnya ditentukan dalam bentuk kualitatif, apabila pengembangan keamanan dan kemakmuan, kualitas pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sebagaimana dengan adanya perbaikan di segi ekonomi, sosial dan politik dalam masa pembaharuan, yang berpengaruh akan akselerasi di masyarakat, khususnya yang bersangkutan terhadap tuntutan masyarakat terhadap adanya keterbukaan penerapan kebijaksanaan pemerintah, kerakyatan saat pengambilan ketetapan pelayanan oleh pemerintah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan

mengimplementasikan undang - undang secara konsisten. selaku konsekuensinya kemudian pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perbandingan Keuanganter hadap Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut demi mendapat kemandirian keuangan daerah yang besar. pada fase kemandirian keuangan yang besar berarti daerah tiada lagi bergantung kepada sumbangan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Akan tetapi jika kemandirian keuangan daerah tinggi, kemudian daerah tidak perlu lagi mendapatkan sumbangan. Bantuan pemerintah tetap diperlukan guna memperlancar pembangunan. Berdasarkan pendahuluan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara”***

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Belanja (Rp)	Pembiayaan (Rp)
1	2	3	4
2017	919.344.863.680,52	897.434.961.374,21	21.899.902.443,25
2018	931.348.388.887,75	988.969.321.061,27	57.620.932.173,52
2019	944.113.503.598,36	957.099.023.598,36	12.985.520.000

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yg telah dikemukakan maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2017 – 2019. Di lihat dari Rasio Kemandirian Efektivitas PAD dan Efisiensi Keuangan Daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tingkat kemandirian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Untuk menganalisis tingkat rasio efektifitas PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Untuk menganalisis tingkat rasio efisiensi kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

1.4. Manfaat Penelitian

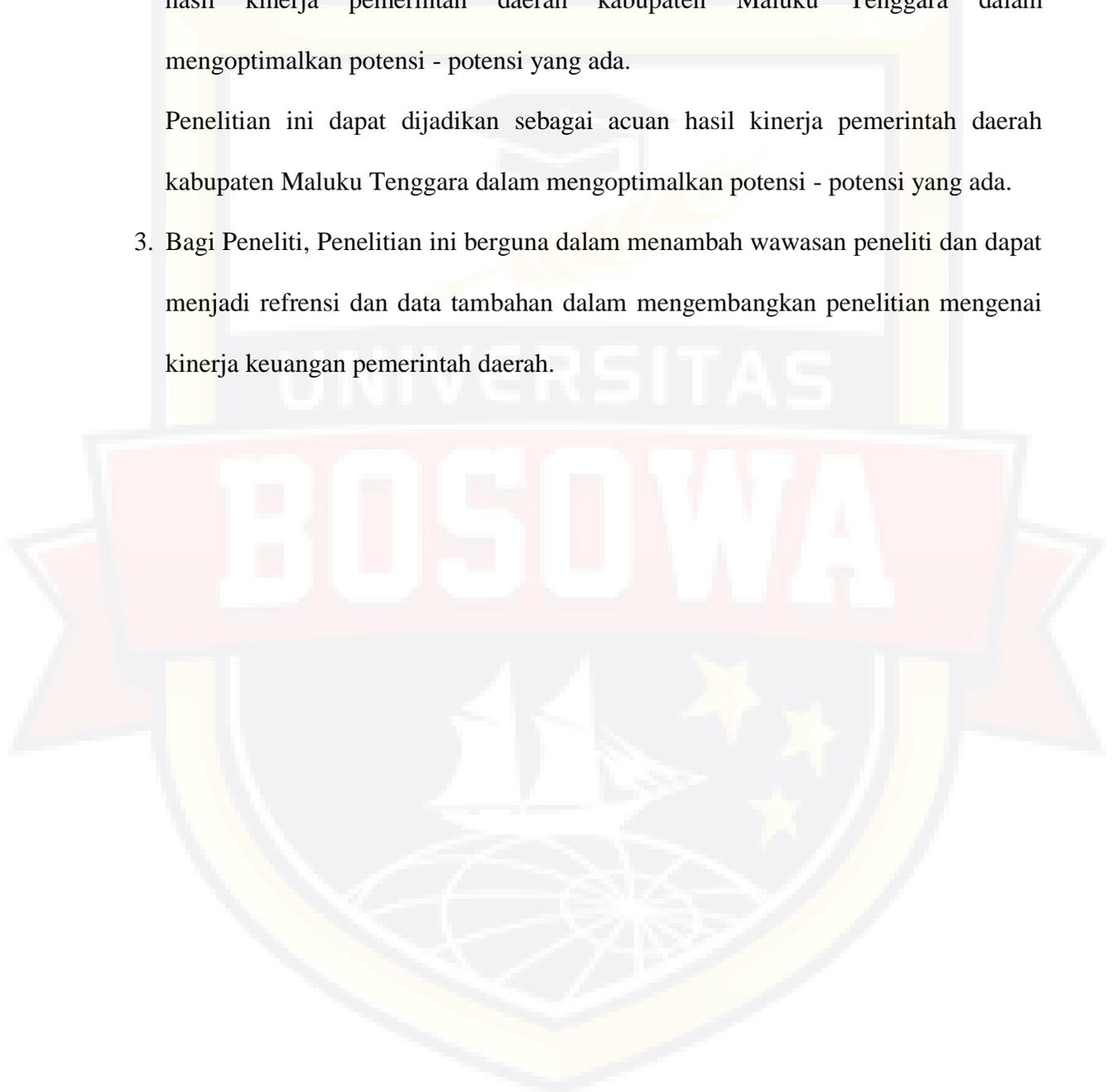
Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk satuan kerja perangkat daerah di pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara agar meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

2. Bagi Pihak Investor dan Masyarakat, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara dalam mengoptimalkan potensi - potensi yang ada.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara dalam mengoptimalkan potensi - potensi yang ada.

3. Bagi Peneliti, Penelitian ini berguna dalam menambah wawasan peneliti dan dapat menjadi referensi dan data tambahan dalam mengembangkan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Keuangan

2.1.2 Pengertian Manajemen Keuangan

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *menagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Inggris, kata manajemen berasal dari kata *to manage* artinya mengelola, membimbing, dan mengawasi. Jika diambil dalam bahasa Italia, berasal dari kata *maneggiare* memiliki arti mengendalikan, terutamanya mengendalikan kuda. Sementara itu, dalam bahasa Latin, kata manajemen berasal dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan, jika digabung memiliki arti menangani

Secara terminologi, para ahli tidak memiliki rumusan yang sama tentang definisi manajemen. *Stoner* sebagaimana dikutip Handoko merumuskan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Weston dan *Brigham* Mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah bidang pengambilan keputusan keuangan, menyelaraskan motif individu dan tujuan perusahaan.

Joshep dan Massie : mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan memanfaatkan secara efektif dana yang diperlukan untuk operasi yang efisien.

Manajemen keuangan ialah satu analisa dimana kegiatan keuangan dalam satu organisasi, tidak lain adalah kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang dilakukan oleh atasan.

Manajemen keuangan bisa di artikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan upaya demi mendapatkan anggaran dengan meminimalisirkan biaya agar penggunaan untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dalam menaikan nilai perusahaan.

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi utama dari seorang manajer keuangan adalah untuk merencanakan, mencari serta memanfaatkan dana dengan berbagai macam cara agar dalam memaksimalkan daya guna dari operasional perusahaan. Sementara itu, manajemen keuangan dalam bisnis maupun individu memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaa Keuangan

Seorang manajer keuangan memiliki peran untuk merencanakan dan memperkirakan anggaran yang dibutuhkan perusahaan di masa mendatang.

2. Penentuan Komposisi Modal

Komposisi modal adalah campuran utang dan ekuitas yang digunakan untuk investasi yang berpeluang menguntungkan perusahaan di masa depan.

3. Kontrol Keuangan

Manajemen keuangan ini juga berfungsi untuk menganalisis hasil aktual perusahaan.

4. Pengelolaan Surplus

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manajer keuangan untuk meningkatkan profabilitas perusahaan, di antaranya menjual surplus aset dan berinvestasi dengan produktif.

5. Investasi Dana

Manajer keuangan memastikan apakah dana yang tersedia untuk bisnis digunakan secara memadai untuk mengembangkan bisnis. Kemudian, perbandingan antara biaya untuk memperoleh data dengan nilai pengembalian harus selalu seimbang.

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Adapun tujuan dari Manajemen keuangan itu sendiri sebagai berikut :

1. Untuk memaksimalkan keuntungan.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pengertian bahwa manajemen ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dengan efisien, yang berarti untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, perlu dicatat bahwa fokus utamanya adalah untuk mencapai tujuan bersama perusahaan, misalnya menghasilkan laba yang cukup.

2. Menjaga aliran dari arus kas (cash flow) perusahaan.

Tidak sedikit perusahaan mengalami kebangkrutan karena mereka tidak memikirkan arus kas perusahaan yang mereka simpan. Padahal ini sangat diperlukan guna mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan dan berapa besar pemasukan yang diperoleh. Ini tentu bisa diketahui hanya jika perusahaan melakukan manajemen keuangan yang tepat. Selain itu, perusahaan juga tidak akan khawatir terhadap tanggungan yang dibayarnya karena sudah diatur dalam manajemen keuangannya.

3. Mempersiapkan struktur modal.

Dari mana perusahaan dapat memperoleh modal kembali jika tidak ada niat untuk mengatur keuangannya. Bahkan keuntunganpun akan sulit terbaca jika mereka tidak memperhatikan keuangannya dengan baik. Untuk itu, pengaturan keuangan sangat bertujuan untuk mempersiapkan modal perusahaan yang diperoleh baik dari internal maupun eksternal.

4. Pemanfaatan keuangan yang tepat.

Kebutuhan perusahaan pastinya beragam. Namun, dengan adanya pengaturan keuangan ini, diharapkan perusahaan dapat menggunakan uangnya seefektif mungkin. Jadi, mereka hanya menggunakannya untuk kebutuhan yang benar benar urgent. Artinya, jika kebutuhan itu tidak mendesak, mereka bisa mengulur waktu untuk memenuhinya.

5. Memaksimalkan kekayaan perusahaan.

Jika Anda bergabung dengan pemilik saham dan investor, tentu Anda perlu memaksimalkan kekayaan agar pembagian keuntungan bisa lebih maksimal. Tentu,

inilah yang menjadi tujuan utama dari manajemen keuangan yakni mengatur keuangan agar dapat mencetak uang yang bernilai tinggi. Manfaat dan tujuan manajemen keuangan memanglah sangat besar. Jika perusahaan dapat memaksimalkan fungsinya, tidak menutup kemungkinan mereka dapat meraup keuntungan yang besar pula dari bisnisnya. Semuanya memang perlu ditata agar setiap pemasukan dan pengeluaran jelas tanpa adanya keraguan. Jadi, jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami kerugian, perusahaan dapat menanggulunginya dengan kas perusahaan yang disimpan. Nah bagi Anda yang ingin tahu lebih tentang keuangan, Anda bisa mengunjungi Finata untuk mengecek software keuangan usaha terbaik.

6. Menurunkan Biaya Modal

Untuk memaksimalkan keuntungan, salah satu cara yang bisa dilakukan sebuah perusahaan adalah dengan menurunkan biaya modal. Manajemen keuangan yang baik akan menentukan biaya modal seminimal mungkin, tetapi masih cukup untuk keberlangsungan hidup perusahaan

2.1.4 Manfaat Manajemen Keuangan

1. Keuangan perusahaan terkontrol dengan baik

Segala pengeluaran dan pemasukan bakal tercatat dengan baik apabila fungsi manajemennya berjalan dengan benar. Hal ini tentu dapat digunakan untuk menentukan batasan-batasan pengeluaran tanpa membebani uang kas perusahaan.

2. Memaksimalkan pemanfaatan dana perusahaan

Manajer keuangan tentu juga memiliki aktivitas memantau mana kira-kira pengeluaran yang bermanfaat dan yang tidak. Apabila perusahaan memiliki manajemen yang baik, maka mereka akan memaksimalkan aset perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat saja.

3. Struktur modal sehat

Manfaat lainnya adalah bisa menciptakan struktur permodalan yang sehat. Modal yang sehat seperti apa? Modal yang sehat adalah yang lebih besar bersumber dari keuntungan daripada utangnya. Artinya rasio modal dari keuntungan lebih besar dari pada utang.

4. Investasi aman

Perusahaan bisa mendapatkan uang dengan menginvestasikan uang yang mereka punya. Bisa melalui perluasan bisnis, atau menginvestasikan uangnya ke pasar modal. Dengan manajemen keuangan dan analisa keuangan yang baik, dana-dana tersebut bakal diinvestasikan dengan aman dan pastinya menguntungkan.

5. Mampu memberikan kepastian untuk para pemegang saham

Salah satu manfaat bila perusahaan memiliki manajerial keuangan yang baik adalah mereka mampu memberikan kepastian laba, kepastian harga pasar, dan kepastian laporan keuangan yang sehat untuk para pemegang sahamnya. Dengan jaminan itu, pemegang saham juga tidak akan ragu untuk meningkatkan besaran investasinya. Artinya, perusahaan akan mendapatkan suntikan permodalan yang lebih besar lagi.

2.2 Kinerja Keuangan

2.2.1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan ialah suatu analisa yang dilakukan agar dapat di lihat sejauh mana perusahaan mengimplementasikan kinerja keuangan menggunakan aturan agar pelaksana keuangan berjalan baik. Kinerja perusahaan ialah satu ilustrasi dimana kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisa menggunakan alat analisa keuangan, supaya di ketahui tentang baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan hasil kerja dalam fase tertentu. Hal ini cukup penting supaya sumber daya dipakai secara optimal untuk menghadapi adanya perubahan wilayah.(Fahmi, 2011:2)

Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan (Hery, 2015).

Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (Sutrisno, 2009:53).

.Menurut Mulyadi (2007:2) kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut Prastowo yang dikutip oleh Putri Hidayatul Fajrin (2016) menyebutkan unsur dari kinerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan pada laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagian dasar bagi ukuran lainnya

Menurut Fidhayatin (2012:205) yang dikutip oleh Aringga (2017) “perusahaan yang sehat nantinya akan dapat memberikan laba bagipara pemilik modal, perusahaan yang sehat juga dapat membayar hutang dengan tepat waktu”. Selain itu, kinerja keuangan dari suatu perusahaan yang telah dicapai dalam satu tahun atau satu periode waktu, adalah gambaran sehat atau tidaknya keadaan suatu perusahaan.

2.1.6. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis laporan keuangan melibatkan penggunaan laporan keuangan, terutama neraca dan laporan laba rugi karena laporan keuangan menyajikan informasi mengenai suatu. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis (Wild, 2005:3).

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi (Jumingan, 2006:242):

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per-Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

2.1.7. Manfaat Kinerja Keuangan

Pada dasarnya, kinerja keuangan sangat bermanfaat untuk sebuah perusahaan. Informasi kinerja keuangan dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal berikut yaitu :

1. Digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa mendatang.
2. Mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatannya.
3. Menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
4. Dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
5. Melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan
6. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan perusahaan pada umumnya dan divisi perusahaan pada khususnya.

2.1.8. Keuangan Daerah

Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 5 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, sebagaimana keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Menurut Halim (2008:25) menyatakan bahwa Keuangan daerah mempunyai ruang lingkup yang terbagi atas bidang yg dikelola langsung BPKD serta kekayaan daerah yg sudah dibagi. termasuk keuangan daerah yang di kerjakan langsung oleh bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari barang inventaris milik Daerah. Dilain sisi, keuangan daerah yg di bagi meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah.

Definisi keuangan daerah ialah segala hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, juga semua hal dalam bentuk uang ataupun barang yang bisa dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai oleh pihak lain, daerah dengan kedudukan lebih tinggi atau negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Halim : 2008)

Keuangan daerah diartikan sebagai taraf pencapaian hasil kerja di sektor aset daerah yang mencakup pendapatan dan belanja daerah juga memakai indeks keuangan yang ditentukan lewat kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk satu periode anggaran.(Paramita : 2015)

2.1.9. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut M.Yusuf (2010:1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya

mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen asset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah

Menurut Syamsi dalam Herisistam (2015:33) kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Agustina dalam Pramita (2015:9) kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem financial maupun nonfinansial (Ihyaul Ulum, 2012 :20). Menurut Halim (2004:24) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Didalam penilaian indikator kinerja sekurang kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu :

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD
2. Efisiensi Biaya
3. Efektivitas Program
4. Pemerataan dan Keadilan Menurut Widodo dalam Halim (2002:L5) terdapat beberapa analisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :
 - a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan

2.2.2 Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam Wahyuni (2008:4), Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Artinya, tidak ada hal-hal yang ditutupi dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut dilibatkan pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, pertanggungjawaban publik dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diaudit, baik oleh internal auditor, yaitu inspektorat maupun oleh eksternal auditor, yaitu BPK-RI di daerah.
3. Nilai uang (*value for money*), yaitu penerapan 3(tiga) prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
 - a. Ekonomi; pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik. Artinya, barang dan jasa dibeli dengan mengeluarkan sejumlah dana harus sesuai dengan kualitasnya.
 - b. Efisiensi; suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan dana yang ada.

c. Efektivitas; hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Artinya, hasil yang dicapai harus sesuai dengan dana, waktu, dan tenaga yang dikorbankannya.

2.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:121), tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.2.4 Analisis Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2015:9), analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Menurut Brigham dan Houston (2001: 426), untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu

tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Akan tetapi nilai riil dari laporan keuangan adalah fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu memprediksi laba dan dividen masa depan. Menurut Sugiyono (2010:34), fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

2.2.5. Tujuan Analisis Laporan Keuangan Daerah

Sebuah laporan keuangan memiliki nilai lebih ketika memberikan antrian atau gambaran tertentu kepada pihak yang menggunakannya. Karena akan memberikan manfaat yang berbeda untuk setiap penggunaannya, analisis keuangan juga dilakukan dengan tujuan yang berbeda. Menurut Kasmir (2011: 68) tujuan analisis laporan keuangan daerah adalah

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik asset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang dicapai beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah apa saja yang perlu dilakukan kedepan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai

Dengan melakukan analisis laporan keuangan daerah maka informasi mentah yang dibaca dari laporan keuangan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan

2.2.6 Analisis Rasio Keuangan

2.2.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:5) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Mahmudi (2015:140) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya”.

Rumus yang dapat digunakan dalam rasio Kemandirian ini menurut Mahmudi (2015:140) adalah :

$$\text{tingkat kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern semakin rendah demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah.

Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan ditabel berikut:

TABEL 2.1
POLA HUBUNGAN DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2010 : 169)

2.3.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:132), efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan Menurut Mahmudi (2015:114), Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Adapun rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015:141) sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun, adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif berimbang.

2.3.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan

pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu tidak perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

TABEL 2.2

KRITERIA EFISIENSI KINERJA KEUANGAN

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2010 : 169)

2.4. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Pendapatan daerah menurut Pasal 20 ayat 1 huruf a terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Dana Perimbangan
 - b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan.

- a. Belanja tidak langsung *Indirect expenditure*, ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung *Direct expenditure*, adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari pengeluaran pembiayaan dan. Penerimaan pembiayaan yang mencakup hal-hal berikut ini :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
 - c. Pencairan dana cadangan
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - e. Penerimaan pinjaman

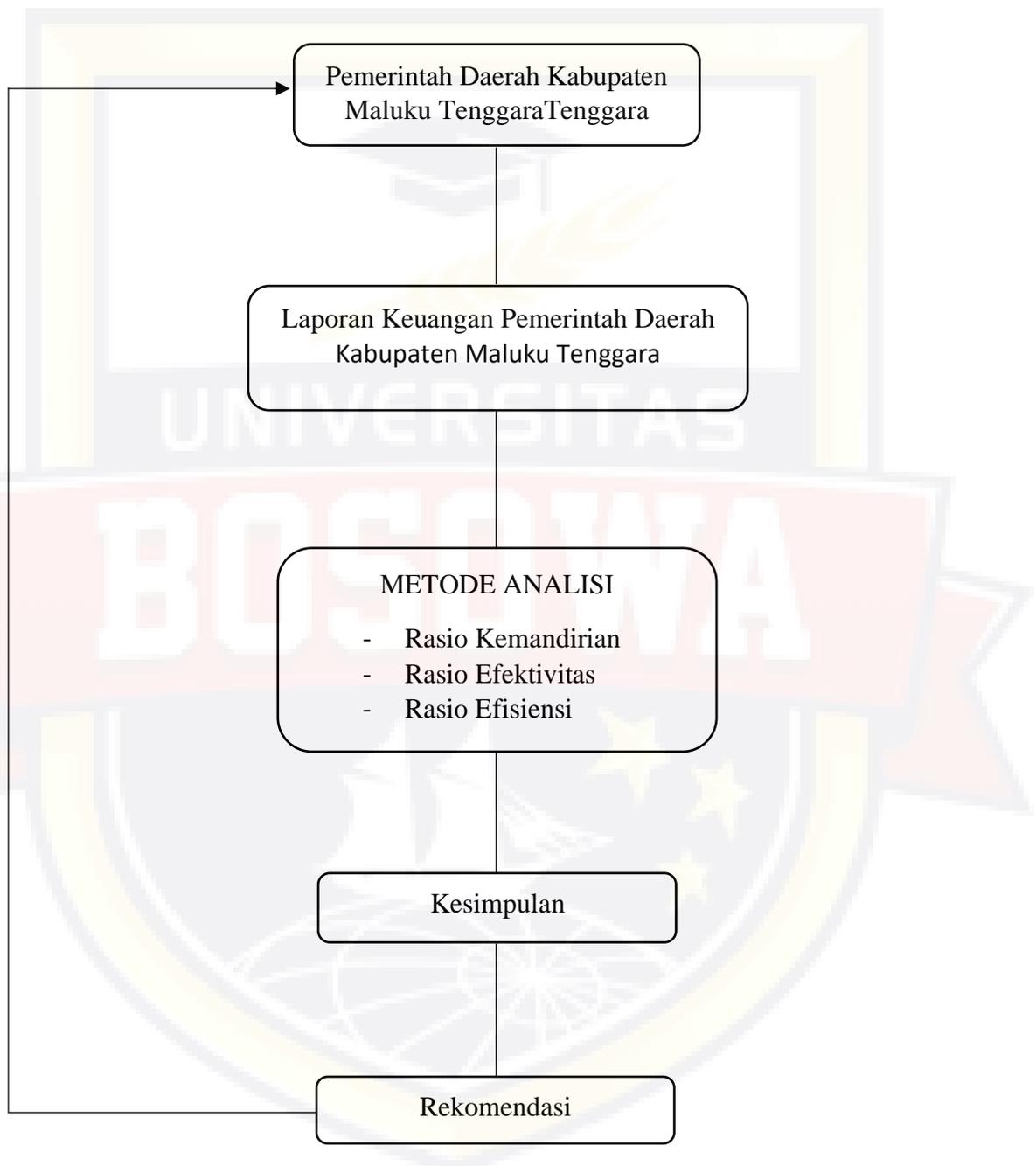
a. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Pengeluaran pembiayaan

mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah, termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah
- c. Pemberian pinjaman

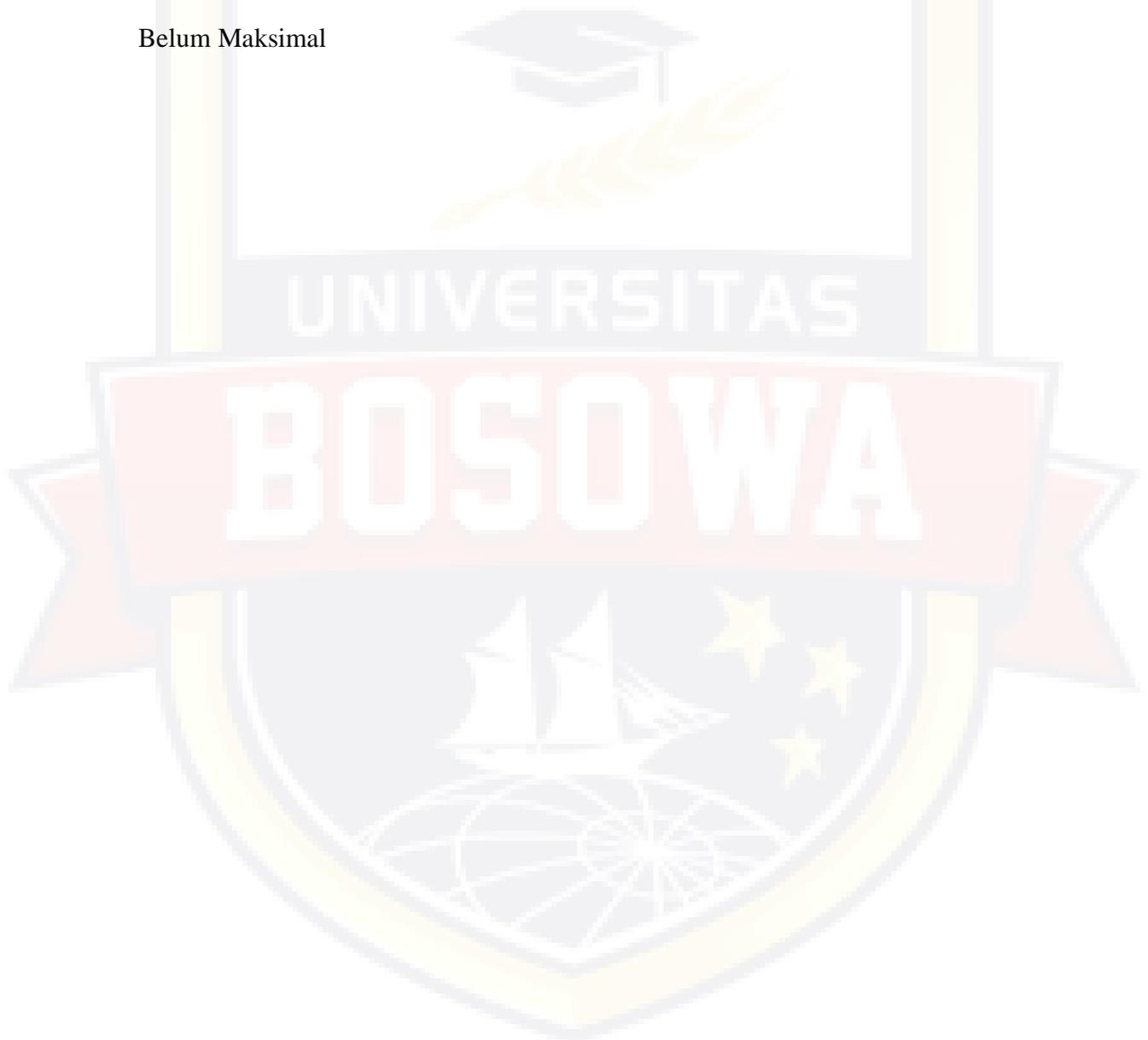


2.2. Kerangka Pikir



2.3. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok diatas, diduga bahwa “Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Tahun Anggaran 2017-2019” Belum Maksimal



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Jl. Raya Langgur - Debut Kei Keci Propinsi Maluku. Terhitung mulai bulan juni sampai dengan bulan juli.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode kepustakaan adalah metode dengan cara mengintip dari buku-buku yang ada kaitannya dengan variabel yang sedang diteliti oleh penulis.

2) Penelitian Lapang (*Field Research*)

Metode penelitin lapang adalah metode yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dengan cara :

a) Metode Pengamatan (*observasi*) adalah pengamatan secara langsung dan sistematis dari obyek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

b) Metode Wawancara (*Interval*) adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang bersangkutan

3.3 Jenis dan Sumber Data

2.3.1 Jenis Data

1. Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka-angka.
2. Data Kuantitatif, adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka-angka

2.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

2. Data Sekunder

yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menghitung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara periode 2016-2019. Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan, mengolah, dan

menginterpretasikan data yang diperoleh yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut. secara uraian atau dalam bentuk kalimat. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

$$\text{Tinggkat kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.5. Defenisi Operasional

- Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan, adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.

- Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahnya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

- Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan dibandingkan dengan targer yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemeritah daerah.

- Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaetan Maluku Tenggara

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah pemekaran baru yang awalnya merupakan bagian dari kota tual. Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Maluku Tenggara terletak antara $50^{\circ}12'19,427''$ sampai $606^{\circ}18,275''$ Lintang Selatan dan $132021^{\circ}39,082''$ sampai $133015^{\circ}31,442''$ Bujur Timur. Luas area kab. Malra $\pm 4.212,15$ Km², dengan luas daratan $\pm 1.031,81$ Km² dan luas perairannya $\pm 3.180,73$ Km². Berdasarkan topografi, Pulau Kei Kecil dengan ketinggian ± 100 M di atas permukaan laut. serta gundukan tanah di tengah dan utara mencapai 115 M. Iklim Kabupaten Maluku Tenggara, sekitar 8 bulan dengan puncak musim hujan terjadi di bulan Mei dan Desember. Suhu rata-rata di Maluku Tenggara pada tahun 2018 adalah 26,7oC dengan suhu minimum 23,3 oC dan suhu maksimum adalah 30,9 oC. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember yaitu 27 hari, oleh karena itu jumlah curah hujannya pun paling banyak di antara bulan-bulan lain yaitu 424,7 mm. Tekanan udara tertinggi terjadi di bulan Agustus 2018 yaitu mencapai 1.009,90 mb.

4.1.2 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Maluku Tenggara

BPKD Kabuoaten Maluku Tenggara yg dulu merupakan unit kecil yang merupakan bagian keuangan sekertasis daerah dan tugasnya mengurus keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku tenggara. yang saat itu potensi keuangan tidak

kompleks serta bagian keuangan kabupaten malra yang terdiri 4 bagian anggaran, pembangunan, verifikasi, dan akuntansi. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan masyarakat kabupaten malra, melalui peraturan daerah kabupaten maluku tenggara, bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. dimana sebagai konteks layanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good govermace*).

Perkembangan, peningkatan pengelolah keuangan daerah yang bertujuan untuk penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai sarana dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten maluku tenggara berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna yang didukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolah keuangan serta standar operasional dan prosedur. (SOP).

Dalam rangka penyelenggaran otonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang didukung oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah. serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara nomor 10 Tahun 2017 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan yang sekaligus membawa penting dalam pengelolaan anggaran daerah. maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan kewenangan membentuk beberapa lembaga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan kebutuhannya.

Penyelenggaraan Pemerintah diperlukan adanya perubahan selain meruoakan tuntutan yang mengharuskan Pemerintahan untuk lebih responsive, transparan, dan akuntabel, juga dipengaruhi oleh berbagai fenomena dan desakan kebutuhan seiring dengan perkembangan dinamika pelayanan publik dalam upaya mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta upaya mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah.

Salah satu lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dibentuk berdasarkan Peraturan daerah antara lain Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara serta pembentukannya melalui peraturan Daerah Kab. Maluku Tenggara No 05 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja berkedudukan sebagai salah-satu perangkat daerah otonomi Kabupaten Maluku Tenggara dituntut adanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih maksimal sehingga diperlukan menyusun rencana strategik dalam rangka pencapaian standar minimal. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Maluku Tenggara melalui Sekertasis Daerah. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembanguna secara berdaya guna dan berhasil, maka dipandang perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan keputusan Bupati Maluku Tenggara.

4.1.3 Visi Dan Misi BPKD Kabupaten Maluku Tenggara

1. Visi BPKAD Kabupaten Maluku Tenggara

“Terwujudnya Masyarakat Maluku Tenggara yang Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan”.

- a. Mandiri dimana kemampuan keuangan daerah yang semakin kuat mendukung penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan dan fasilitas daerah.
- b. Cerdas dalam visi ini adalah, disamping cerdas intelektual, mental, spritual, emosional dan sosial.
- c. Demokratis, demokratis maluku tenggara yang mendukung adanya partisipasi masyarakat, baik didalam perumusan/penerapam atau penilaian kecakapan publik
- d. Berkeseimbangan, ditandai oleh penyaluran aktivitas beserta dampak pengembangan secara menyeluruh antar daerah,

2. Misi BPKD Kabupaten Maluku Tenggara

- a. Meningkatkan Kinerja Dan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabuaten Maluku Tenggara

- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
- c. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yg Berdaya Asing.
- d. Mempercepat pembangunan Infrastruktur dalam Konektivitas
- e. Mengembangkan pembaharuan mendasar Kewilayaan atau ancangan Prosperity Budaya, keutamaan Lokal Masyarakat dan Hukum Adat.

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPKD Kabupaten Maluku Tenggara

Berdasarkan peraturan bupati maluku tenggara nomor 6 tahun 2016 maka badan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Mempunyai Fungsi:

- a. Pelaksanan tugas dukungan teknis dibidang keuangan serta aset daerah
- b. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan aset daerah
- c. Pembinaan teknis pentelengaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

4.1.6 Susunan Organisasi

Didalam melakukan kegiatan perusahaan, salah satu kondis yang perlu dilihat ialah susunan organisasi yang serta terstruktur demi lancaranya perintah

operasional perusahaan. Untuk itu perlu adanya pembagian tugas supaya setiap bidang di perusahaan mengerti dengan jelas apa yang menjadi tugas, otoritas serta kewajibannya supaya tak timbul ketidakadilan dalam bekerja. Demikian pula diciptakan serta dibina persekutua yang sependirian antar karyawan sehingga keinginan perusahaan berhasil dicapai.

Adapun susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Maluku Tenggara :

1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a) Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b) Bagian Umum;
 - c) Bagian Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran,
 - a) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c) Sub Bidang Evaluasi Angggaran
4. Kas Daerah
 - a) Bidang Penatausahaan Kas Daerah
 - b) Bidang Pembayaran Kas Daerah

- c) Bidang Pengendalian dan Pelaporan Kas Daerah

5. Akuntansi dan Pelaporan

- a) Bidang Akuntansi Penerimaan
- b) Bidang Akuntansi Pengeluaran
- c) Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

6. Aset Daerah:

- a) Perencanaan dan Pemanfaatan Aset
- b) Penatausahaan dan Pengendalian
- c) Pelaporan dan Penghapusan

4.1.7 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Maluku Tenggara mengenai susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, BPKD Kabupaten Maluku Tenggara memiliki tugas pokok mendukung Bupati dalam mengerjakan peranan kegiatan di pemerintahan khususnya penunjang bidan keuangan. Dalam melakukan tanggung jawab. BPKD Kabupaten Maluku Tenggara memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pembentukan strategis teknis manajemen keuangan serta aset milik daerah;
2. penerapan misi bantuan teknis manajemen keuangan serta aset daerah;
3. Pemantaun, ulasan, dan pengabaran pelaksanaan tugas bantuan teknis manajemen keuangan daerah;

4. Pembaharuan teknis dan penyelenggaraan tugas pendukung kegiatan pemerintahan dibidang penyelenggaraan keuangan dan barang milik daerah
5. Pengoperasian tata usaha dan peranan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Pengelola Keuangan Daerah ialah suatu penunjangbagi pemerintahan yang menerapkan penunjang keuangan, dibina oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. demikian tugas dan fungsi dari Sekertaris dan masing-masing Bidang sebagai berikut :

1. Sekertaris

Sekertaris merupakan pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam mengoperasika pengelolaan badan.untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekertariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkordinasian pengelolaan program, monitoring, penilaian dan pelaporan badan;
- b. Pengurusan rumah tangga, tata kelola dan kepegawaian badan;
- c. Pengkordinasian pembentukan rancangan komoditas lembaga
- d. Pembentuka strategi penataan organisasi badan
- e. Pengelolaan keuangan badan
- f. Pengelolaan situs web badan
- g. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, sekertariat dipimpin oleh sekertaris dan dibantu oleh :

- a. bagian program dan pelaporan
 - b. bagian umum dan kepegawaian
 - c. bagian keuangan
2. bidang perencanaan

Sub bidang perencanaan mempunyai tugas membantu kepala bidang Daerah dalam melaksanakan analisis perencanaan barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, sub bidang perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan data formulasi strategi teknis analisis perancangan kebutuhan barang milik daerah
 - b. Penyediaan data formulasi strategi standarisasi produk dan harga produk
 - c. Penyediaan data formulasi kebijakan teknis dan penerapan pengadaan barang milik daerah
 - d. susunan hasil dan penilaian kegiatan pada bidang perancangan
 - e. penerapan peranan yang diberikan atasan sesuai tugasnya
3. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. rancangan rumah tangga dan tata kelola
- b. Pengelolaan barang/jasa badan

- c. Penyediaan formulasi penyusunan rancangan produk hukum
- d. Penyediaan formulasi strategi kebijakan dan susunan organisasi
- e. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian badan dan pelaksanaan
- f. peranan yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

4. Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan badan. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan keuangan badan
- b. Susunan laporan keuangan badan dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pengkordinasian penyusunan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. pengkordinasian susunan analisa kebijakan anggaran daerah
- b. pengkordinasian susunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan
- c. pengkordinasian susunan rancangan anggaran pendapatan daerah
- d. pengkordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang anggaran dan pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

6. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya,

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kas daerah
- b. Pengelolaan belanja tidak langsung dan belanja pegawai
- c. Pengelolaan anggaran PPKD
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Bidang Kas Daerah
- b) Bidang Perbendaharaan Belanja tidak langsung Pegawai dan
- c) Bidang Perbendaharaan PPKD

7. Bidang Akuntansi

bidang akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan akuntansi keuangan daerah.

4.2 Data Khusus

4.2.1 APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017-2019

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Belanja (Rp)	Pembiayaan (Rp)
1	2	3	4
2017	919.344.863.680,52	897.434.961.374,21	21.899.902.443,25
2018	931.348.388.887,75	988.969.321.061,27	57.620.932.173,52
2019	944.113.503.598,36	957.099.023.598,36	12.985.520.000

BOSOWA



TABEL 4.1
APBD KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2017-2019

URAIAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli			
Daerah	48.344.863.680,52	52.901.155.662,39	50.582.324.544,00
Pendapatan			
Transfer	678.799.283.605,00	692.814.668.171,00	704.037.707.000,00
Lain-lain			
Pendapatan yang Sah	197.689.68.546,00	180.632.565,054,36	189.493.472.054,36
BELANJA			
Belanja Tidak Langsung			
Belanja Tidak Langsung	478.424.627.324,41	488.026.941.304,77	488.532.792.908,36
Belanja Langsung			
Belanja Langsung	462.652.345.526,	500.942.379,756,50	468.566.230.690,00
PEMBIAYAAN			
Penerimaan			
Daerah	Rp.63.452.532.874,00	Rp.62.620.932.173,52	Rp.17.985.520.000,00
Pengeluaran			
Daerah	Rp.500.000.000,00	Rp.500.000.000,00	Rp.500.000.000,00

Sumber data : BPKD Kabupaten Maluku Tenggara

4.3 Deskriptif Data

Analisis kinerja keuangan BPKD Kabupaten Maluku Tenggara dalam penelitian ini merupakan satu mekanisme pengukuran terhadap taraf kemajuan perkembangan BPKD Kabupaten Maluku Tenggara di bidang keuangan untuk kurun waktu 2017-2019. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPKD Kabupaten Maluku Tenggara pada penelitian ini adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Efisiensi Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Maluku Tenggara. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun hasil dari rasio tersebut adalah:

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintah, pembagunan jasa bagi warga negara yang sudah menyetor pajak dan retribusi daerah.

a. Tahun 2017

Presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 yaitu :

$$2017 = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$2017 = \frac{48.344.863.680,52}{698.799.283.605,00} \times 100\%$$

$$= 7,12\%$$

b. Tahun 2018

Presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 yaitu :

$$2018 = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$2018 = \frac{931.348.388.887,75}{988.969.321.061,27} \times 100\%$$

$$= 7,63\%$$

c. Tahun 2019

Presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 yaitu :

$$2019 = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{944.113.503.598,36}{704.037.707.000,00} \times 100\%$$

$$= 7,18\%$$

TABEL 4.2
PERHITUNGAN RASIO KEMANDIRIAN PAD APBD
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2017-2019

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD	Pola
Anggaran	(Rp)	(Rp)	(%)	Hubungan
2017	Rp. 48.344.863.680.52	Rp.678.219.283.405,00	7,12%	Instruktif
2018	Rp.52.901.155.662.39	Rp.692.814.668.171.00	7,63%	Instruktif
2019	Rp.50.582.324.544,00	Rp.704.037.707.000,00	7,18%	Instruktif

Sumber data : BPKD Kabupaten Maluku Tenggara

menurut rincian pada tabel 4.2 diketahui bahwa pendapatan Transfer dari pihak luar atau sumbangan dari pihak luar dan pemerintah pusat mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar Rp. 692.814.668.171.00 pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 704.037.707.000, untuk peningkatan dan pendapatan dari pihak luar ini dipengaruhi dengan adanya pos-pos dana bantuan dari pihak luar seperti : dana bagi hasil pajak, dan bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

Menurut rincian pada tabel 4.2 kinerja keuangan BPKD Kabupaten Maluku Tenggara terbelang sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah lebih besar ketimbang daerah itu sendiri. kemandirian pemerintah daerah (daerah tak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi peningkatan pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2017 Rasio Kemandirian sebesar 7,12%% Jika dilihat dari tahun ketahun pola hubungan kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan instruktif karena masih tergolong dalam interval 0%-25% dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keunagan Daerah dari tahun 2017 hingga 2019 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memiliki rata-rata kemandirian masih terbelang rendah dalam kategori kemampuan keuangan dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibanding pemerintah daerah, jika dilihat dari rasio kemandirian keunagan daerah yang tergolong dalam interval

0%-25% Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung dari bantuan pemerintah pusat.

Jadi kemandirian keuangan BPKD Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sedikit dan belum dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

4.4.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Realisasi Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensial asli daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

a. Tahun 2017

Presentase Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 yaitu :

$$2017 = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$2017 = \frac{919.344.863.680.52}{1.419.404.833.640.52} \times 100\%$$

$$= 0,64\%$$

b. Tahun 2018

Presentase Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 yaitu :

$$2018 = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$2018 = \frac{931.348.388.887,75}{1.542.452.635.234.11} \times 100\%$$

$$= 0,63\%$$

c. Tahun 2019

Presentase Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 yaitu :

$$2019 = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{944.113.503.598,36}{1.637.624.528.320,46} \times 100\%$$

$$= 0,57\%$$

TABEL 4.3
PERHITUNGAN RASIO EFEKTIVITAS PAD APBD
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

TAHUN 2017-2019

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	REPAD	Kriteria
Anggaran	(Rp)	(Rp)	(%)	
2017	1.419.404.833.640.52	919.344.863.680.52	0,64%	tidak efektif
2018	1.542.452.635.234.11	931.348.388.887,75	0,63%	tidak efektif
2019	1.637.624.528.320,46	944.113.503.598,36	0,57%	tidak efektif

Sumber data : BPKD Kabupaten Maluku Tenggara

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3 menunjukkan estimasi PAD Kabupaten Maluku Tenggara terus mengalami kenaikan Setiap tahunnya Pada tahun 2017 PAD dianggarkan senilai Rp. 1.419.404.833.640. dan tahun 2018 dinaikan menjadi Rp1.542.452.635.234.11 kemudian di tahun 2019 dinaikan menjadi lag menjadi Rp. 1.637.624.528.320,46 dari total anggaran.

Berdasarkan perincian pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BPKD Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2017 sebesar 0.64%, tahun 2018 sebesar 0,63, dan pada tahun 2019 sebesar 0,57%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Maluku Tenggara untuk tahun 2017 dan 2019 berjalan tidak Efektif karena efektivitas yang diperoleh <100%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 4.3 Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun 2017-2019 kurang efektif karena rata-rata efektivitasnya diatas <100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga dapat dikatakan kurang efektif dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

4.4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menjelaskan perpaduan antara besarnya biaya yang dikeluarkan guna memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

a. Tahun 2017

Presentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2017 yaitu :

$$2017 = \frac{897.434.961.374,21}{919.344.863.680,52} \times 100\%$$

$$= 0,97\%$$

b. Tahun 2018

Presentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2016 yaitu :

$$2018 = \frac{988.969.321.061,27}{931.348.388.887,75} \times 100\%$$

$$= 106,1\%$$

c. Tahun 2019

Presentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019 yaitu :

$$2019 = \frac{944.113.503.598,36}{957.099.023.598,36} \times 100\%$$

$$= 0,98$$

TABEL .4.4
PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2017-2019

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2017	897.434.961.374,21	919.344.863.680,52	0,97%	Kurang Efisien
2018	988.969.321.061,27	931.348.388.887,75	106,1%	Tidak Efisien
2019	957.099.023.598,36	944.113.503..598,36	0,98%	Kurang Efisien

Sumber data : BPKD Kabupaten Maluku Tenggara

Menurut rincian pada tabel 4.4 menunjukkan realisasi total belanja daerah Kab. Maluku Tenggara tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp. 897.434.961.374,21 naik pada tahun 2018 menjadi Rp. 988.969.321.061,27 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp. 957.099.023.598,36 dari total pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tabel 4.4 dapat dikatakan realisan efisiensi keuangan daerah malra tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat kurang Efisien. Hal ini disebabkan karena selisi total belanja dengan total pendapatan sangat beda tipis.

4.5 Pembahasan Dan Hasil Perhitungan

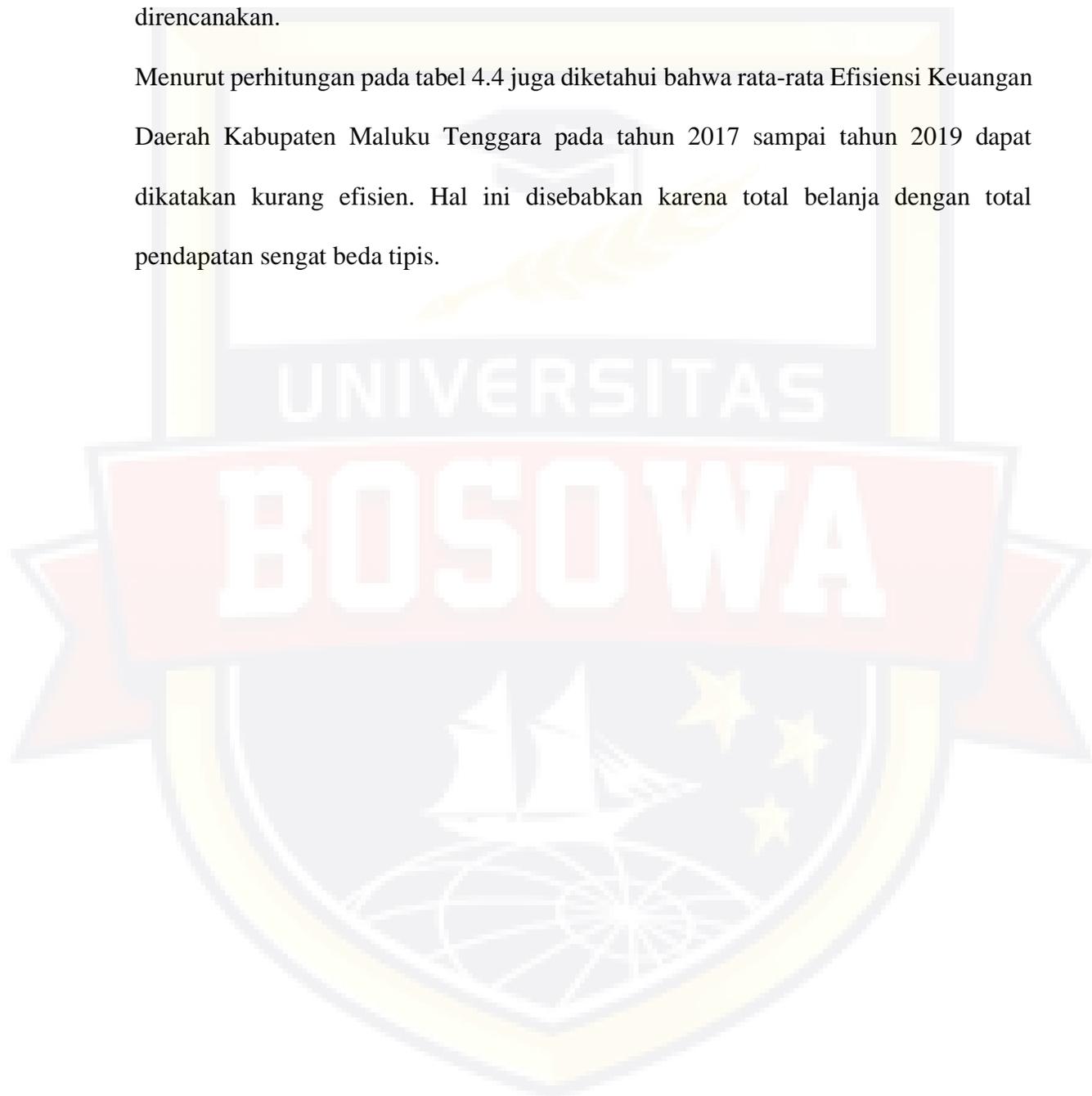
Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, rata-rata Rasio kemandirian keuangannya terbilang rendah dan kategori kemampuan keuangannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah lebih besar dibanding dengan daerah itu sendiri, jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah termasuk dalam interval 0%-25%. Dimana Rasio Kemandirian masih rendah yang mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih tergantung pada pemerita pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan BPKD Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembanguna.

Menurut uraian dan hasil pada tabel 4.3 Efektivitas Kinerja Keunagan Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun 2017-2019 kurang efektif karena rata-rata efektivitasnya diats <100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah tidak Sesuai dengan yang dianggarkan, Pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara juga dapat dikatakan kurang efektif dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Menurut perhitungan pada tabel 4.4 juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dikatakan kurang efisien. Hal ini disebabkan karena total belanja dengan total pendapatan sangat beda tipis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisa di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut :

1. Kinerja Keuangan BPKD Kab. Maluku Tenggara, dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungan instruktif.
2. Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Maluku Tenggara jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan asli Daerah diketahui bahwa efektivitas keuangan BPKD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2017, 2018, 2019 berjalan tidak efektif.
3. Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Maluku Tenggara jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dikatakan kurang efisien

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tenggara harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. dengan melakukan pengawasan dan pengendalian sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu

pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD. Dengan adanya program peningkatan PAD, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

2. Pemerintah Daerah harus memaksimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang ada. keinginan dalam upaya meningkatkan Pendapatan, pemerintah daerah perlu mencari alternatif lain yang memungkinkan untuk mengatasi kekurangannya pembiayaannya, hal ini di perlukan kreativitas dari aparat pengelolah keuangan daerah untuk mencari sumber pembiayaan baik melalui program kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah
3. Untuk mengefisiensikan keuangan daerah pemerintah harus mampu menyesuaikan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah agar tidak defisit pada keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2012 *“Pengelola Keuangan Daerah”, Edisi Ketiga* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Ayu Febriyanti Puspitasari, 2011 *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011”* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Fahmi Irham, 2011 *“Analisis Laporan Keuangan”* Lampulo : ALFABETA.
- Fitriyah Agustin, 2007 *“Pengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Skripsi tidak di Publikasikan”* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Irma Nirmaladewi, 2017 *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Skripsi tidak di Publikasikan”* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
- Mahmudi, 2016 *“Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2015;9 *Tujuan Pengukur Kinerja Keuangan Daerah 1, untuk memperbaiki kinerja pemerintah 2 untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan 3 untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan perbaikan komunikasi kelembagaan*
- M. Yusuf, 2010 *“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah daerah kepada stakeholder.*
- Mochammad Faishal Hakim, 2018 *“Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2011”* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Nurulafifah Tyas, 2012. *“Analsis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010”* Jurnal Kajian Pendidikan & Akuntansi Indonesia Edisi 1 Vol 1 Tahun 2012.

Sijabat Saleh Wachid, 2014. *“Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Malang tahun Anggaran 2008-2012”* Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Sri Widada, 2012. *“Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.”* Fakultas Ekononmi Universitas Negeri Yogyakarta.

Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonisia, Yogyakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Yani, A 2010. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, edisi kesatu cetakan kedua*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta